

SURVEI LAYANAN PPID TAHUN 2024

PPID TINGKAT I DJPb





Profil PPID Tingkat I DJPb

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan yang juga memiliki kantor vertikal di seluruh Indonesia bertanggungjawab atas pengelolaan layanan informasi publik pada PPID Tingkat I DJPb, PPID Tingkat II (lingkup kanwil), hingga PPID Tingkat III (lingkup KPPN). Dalam pelaksanaannya, PPID tersebut bertanggungjawab secara berjenjang yaitu PPID Tingkat III (Kepala KPPN) bertanggungjawab kepada PPID Tingkat II (Kepala Kanwil). Sedangkan PPID Tingkat II bertanggungjawab kepada PPID Tingkat I DJPb (Sekretaris DJPb). Selanjutnya, PPID Tk. I DJPb disamping bertanggungjawab kepada Atasan PPID DJPb (Direktur Jenderal Perbendaharaan) juga bertanggungjawab kepada PPID Kemenkeu (Kepala Biro KLI, Setjen Kemenkeu).

Dengan ditetapkannya PMK 129/2019 dan KMK 879/2019 terjadi perubahan struktur PPID khususnya PPID Tingkat I DJPb yaitu masuknya Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah struktur Ditjen Perbendaharaan menjadi PPID Tingkat II DJPb. Adapun BLU yang masuk ke dalam struktur PPID DJPb adalah BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP).



Profil PPID Tingkat I DJPb

Seiring dengan terbitnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Kementerian Keuangan juga melakukan penyesuaian melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/MK/01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang diikuti penerbitan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Berdasarkan PMK dan KMK tersebut, pengelolaan PPID dilaksanakan oleh 1 (satu) Atasan PPID Kementerian Keuangan, 1 (satu) PPID Kementerian Keuangan, 12 (dua belas) Atasan PPID Tingkat I dan 863 (delapan ratus enam puluh tiga) PPID Pelaksana (12 PPID Tingkat I, 117 PPID Tingkat II, 734 PPID Tingkat III).

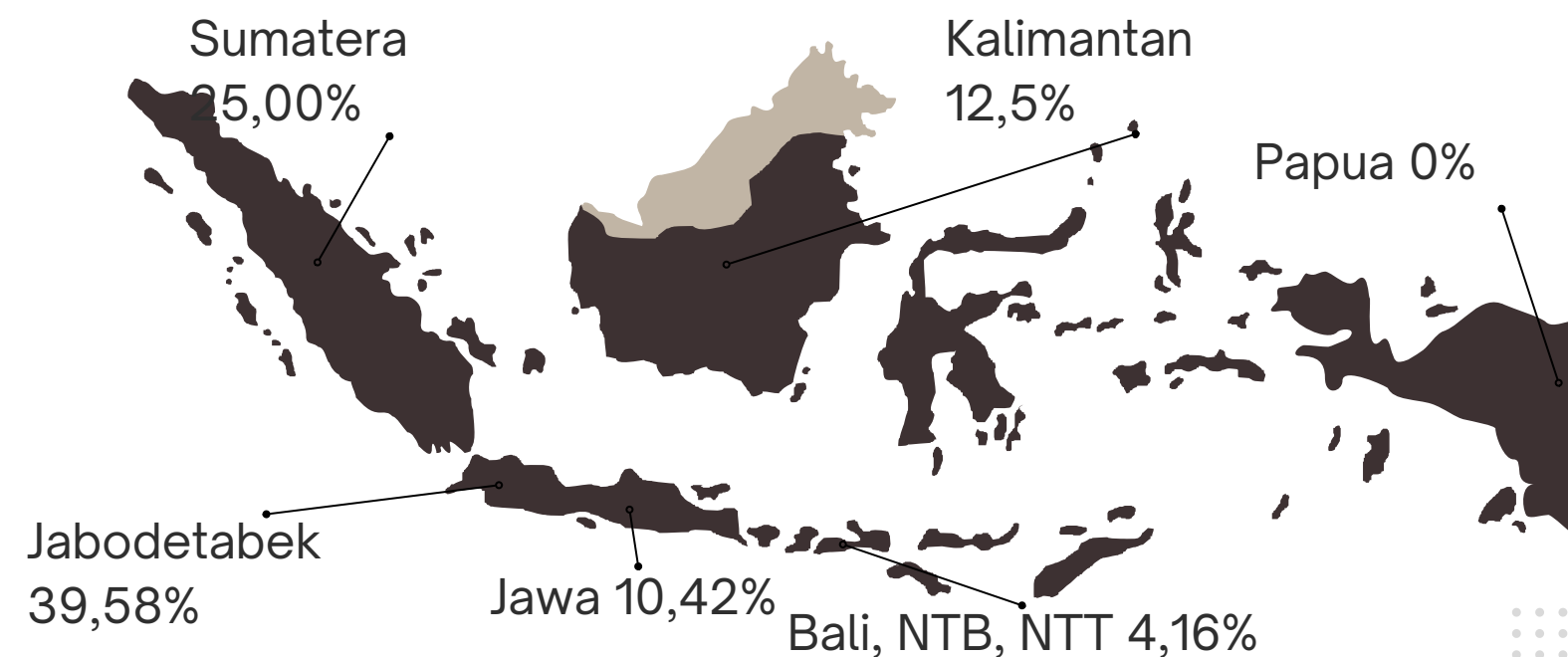
Dengan didukung sistem informasi yang memadai di lingkungan Kementerian Keuangan yang berupa aplikasi SI PPID Kemenkeu, website e-PPID Kemenkeu, dan aplikasi mobile PPID untuk pemohon, PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkomitmen penuh dalam mendukung keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Profil Responden

- Total responden sebanyak **48 Pemohon Informasi**.
- Pemohon informasi berdasarkan jenis kelamin yaitu pria sebanyak 27 pemohon dan wanita sebanyak 20 pemohon.
- Mayoritas domisili pemohon berada di Kota Jabodetabek sebanyak 24 pemohon (51,1%), kemudian di Sumatera sebanyak 9 pemohon (19,2%), diikuti Jawa (non-Jabodetabek) sebanyak 7 pemohon (14,9%), Kalimantan sebanyak 3 pemohon (6,4%), Bali, NTB, NTT sebanyak 3 pemohon (6,4%), dan Papua sebanyak 1 pemohon (2,1%)

Domisili Responden



Jenis Kelamin Responden

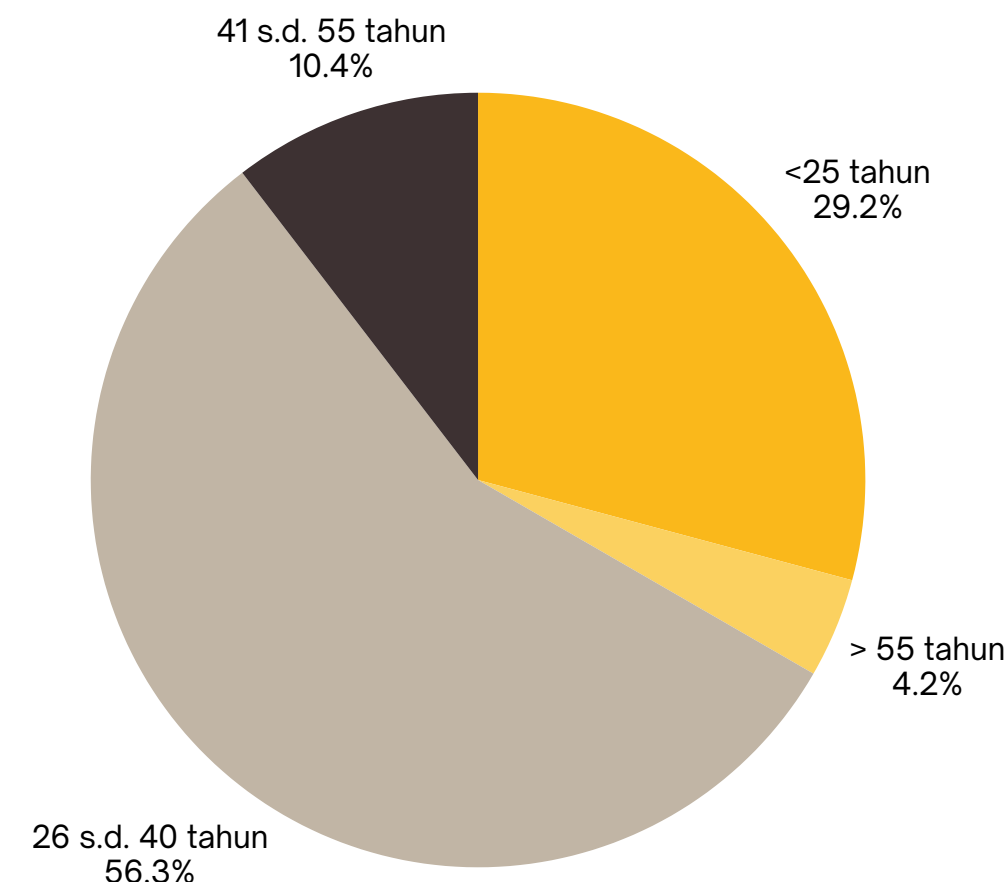




Profil Responden

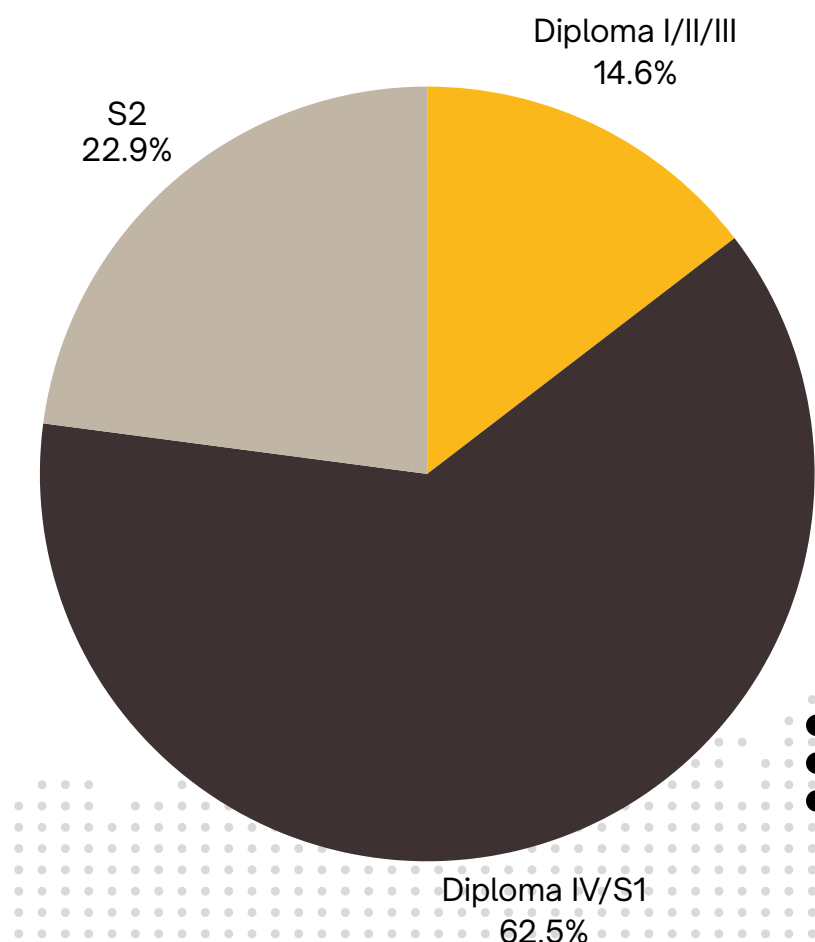
Usia Responden

- Secara umum Responden pemohon informasi melalui PPID lingkup DJPb berusia antara 26 s.d. 40 tahun sebanyak 27 pemohon (56,25%). Pada urutan kedua adalah pemohon berusia di bawah 25 tahun sebanyak 14 pemohon (29,17%). Pada urutan ketiga adalah pemohon berusia di atas 41 tahun sebanyak 5 pemohon (10,42%).



Pendidikan terakhir

- Pemohon informasi didominasi pemohon yang memiliki backgroud pendidikan terakhir setingkat Diploma IV/S1 sebanyak 30 pemohon (62,50%), diikuti Diploma I/II/III sebanyak 7 pemohon (14,58%), dan S2 sebanyak 11 pemohon (22,92%).

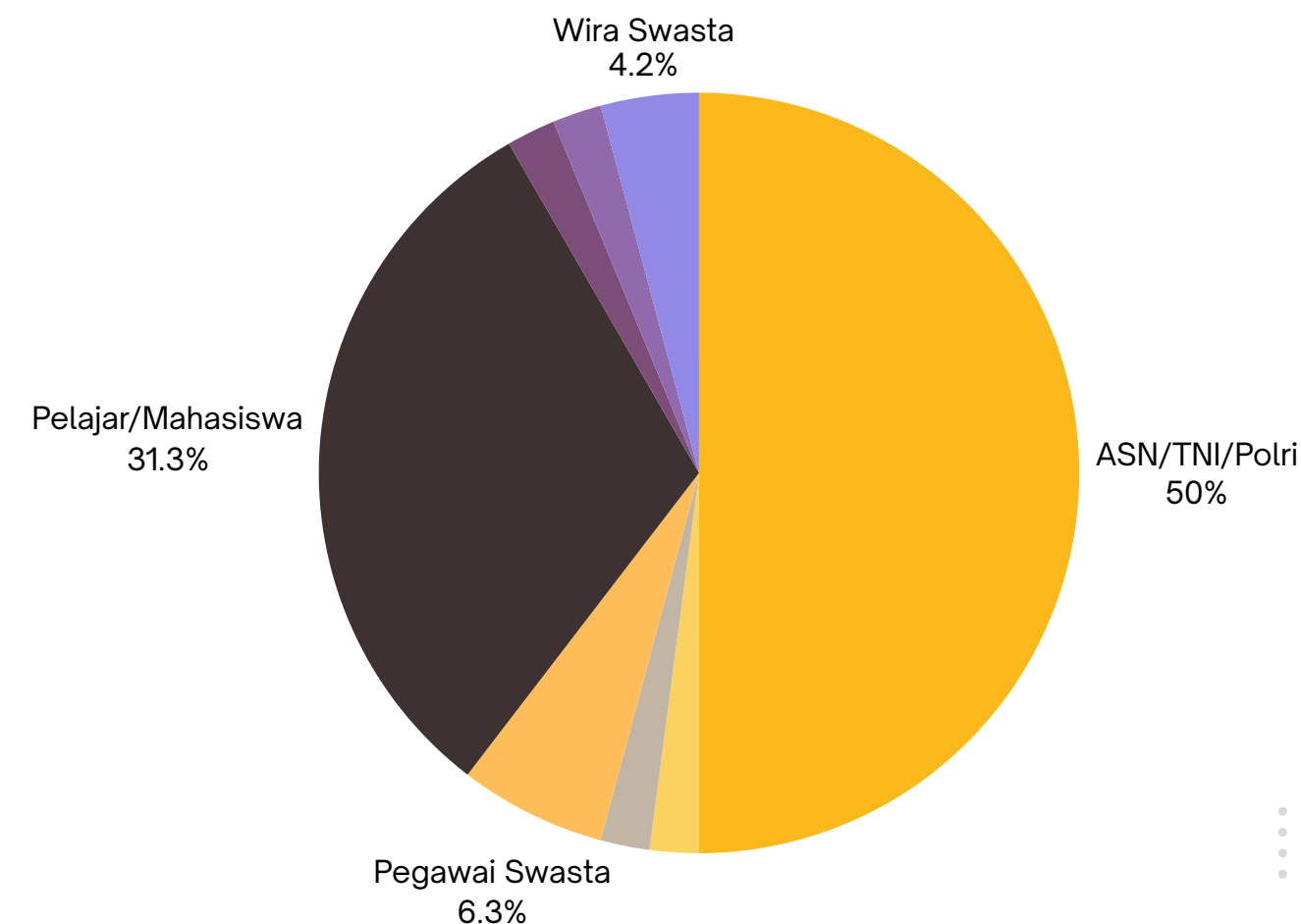




Profil Responden

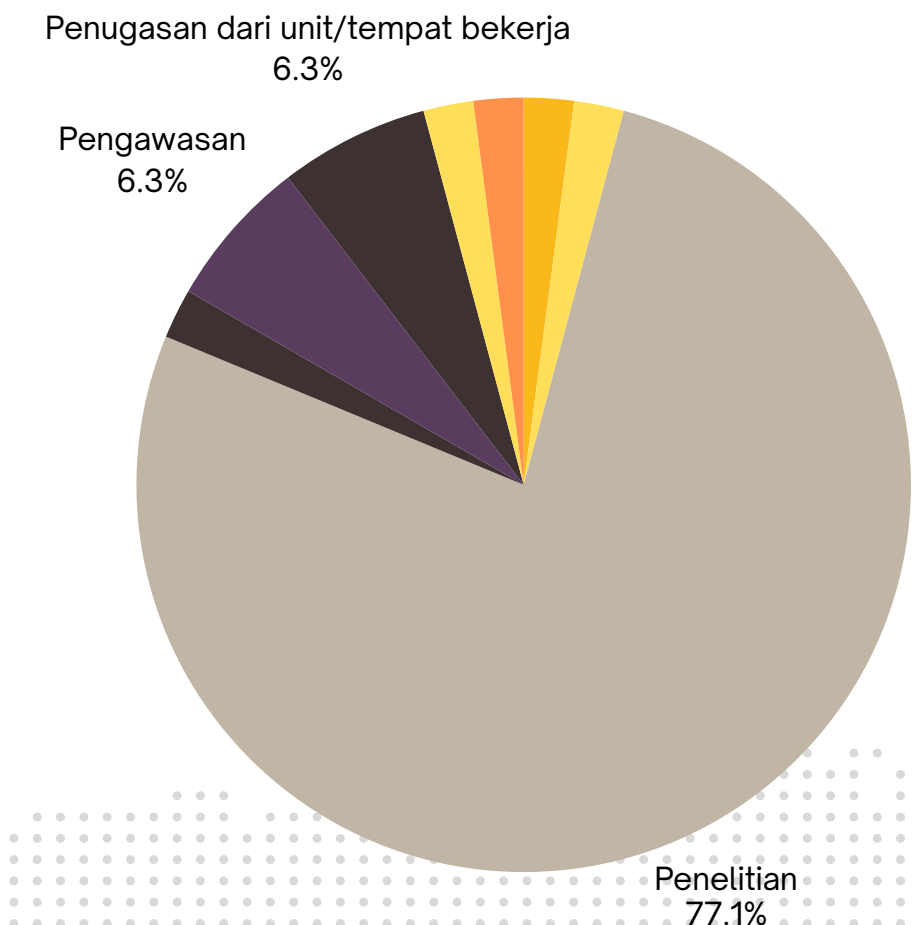
Pekerjaan

- Mayoritas pemohon informasi bekerja sebagai ASN/TNI/Polri sebanyak 24 pemohon (50,00%), diikuti dengan Pegawai Swasta sebanyak 3 pemohon (6,25%) dan Pelajar/Mahasiswa sebanyak 15 pemohon (31,25%).



Tujuan Permintaan

- Adapun secara keseluruhan, tujuan permintaan data digunakan untuk penelitian/riset/kajian akademik sebanyak 37 pemohon (77,08%), diikuti dengan Penugasan dari unit/tempat bekerja sebanyak 3 pemohon (6,25%), dan Pengawasan sebanyak 3 pemohon (6,25%).

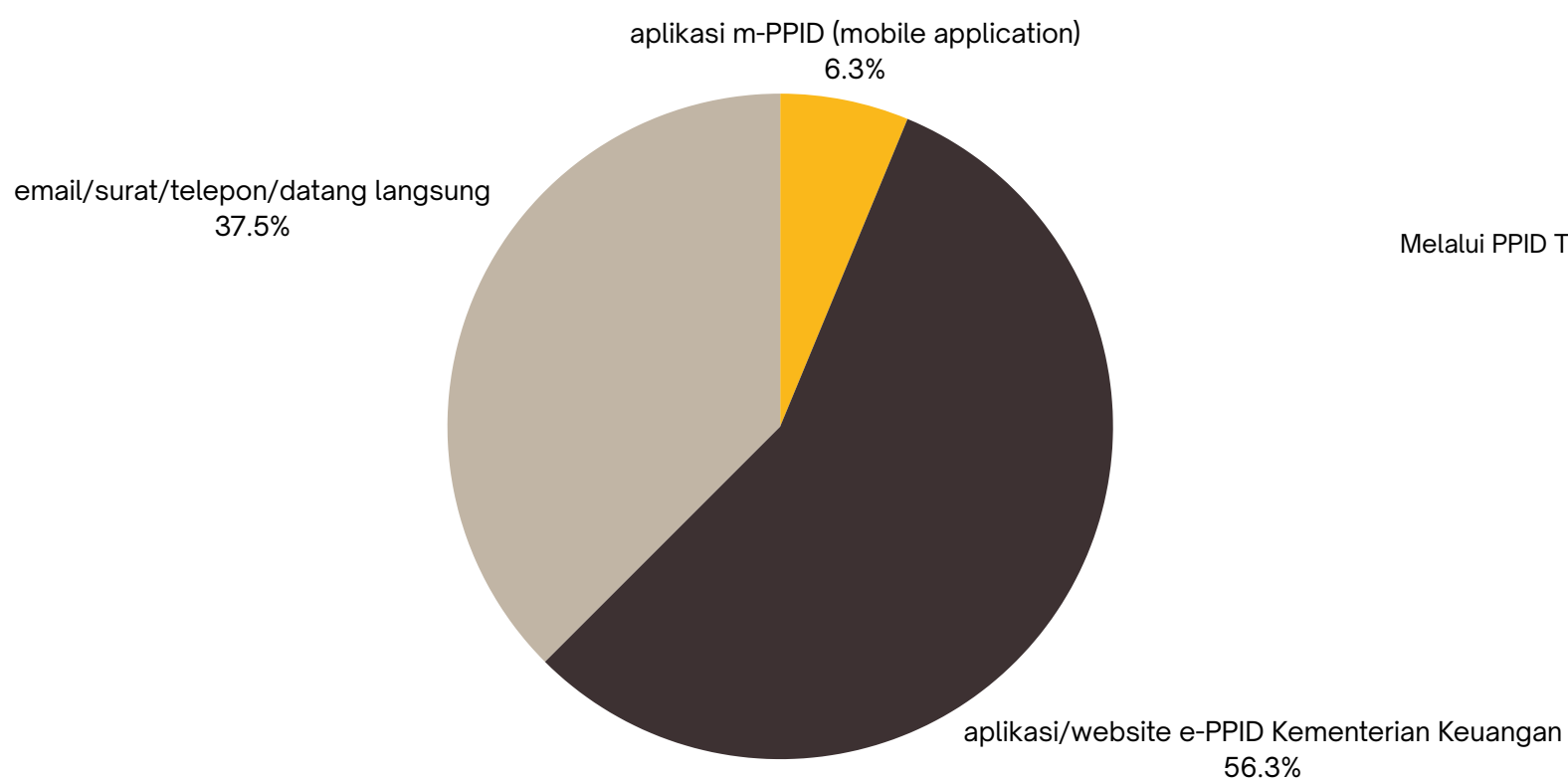




Layanan Informasi PPID Tingkat I DJPb

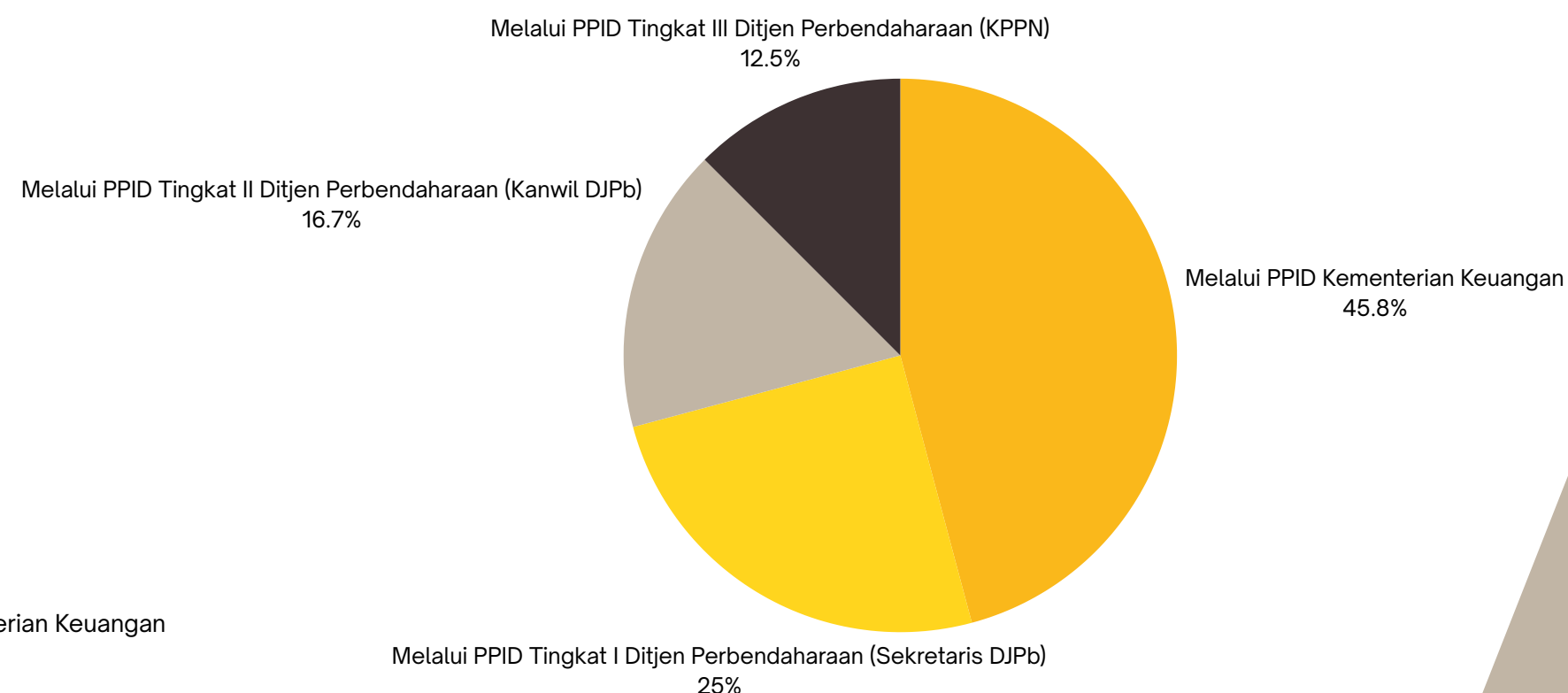
Kanal Permintaan yang Disukai

- Sebanyak 27 pemohon (56,25%) menyukai menggunakan jalur website e-ppid kemenkeu dibanding menggunakan aplikasi mobile PPID sebanyak 3 pemohon (6,25%) atau memilih datang langsung atau mengirimkan permohonan melalui surat, email, dan telepon sebanyak 18 pemohon (37,5%).



Jalur Permintaan Informasi

- Pemohon Informasi berdasar jalur permintaannya melalui PPID Kementerian Keuangan sebanyak 22 pemohon (45,83%), langsung PPID Tk. I DJPb sebanyak 12 pemohon (25%), langsung PPID Tk. II DJPb sebanyak 8 pemohon (16,67%), dan langsung PPID Tk. III DJPb sebanyak 6 pemohon (12,5%).

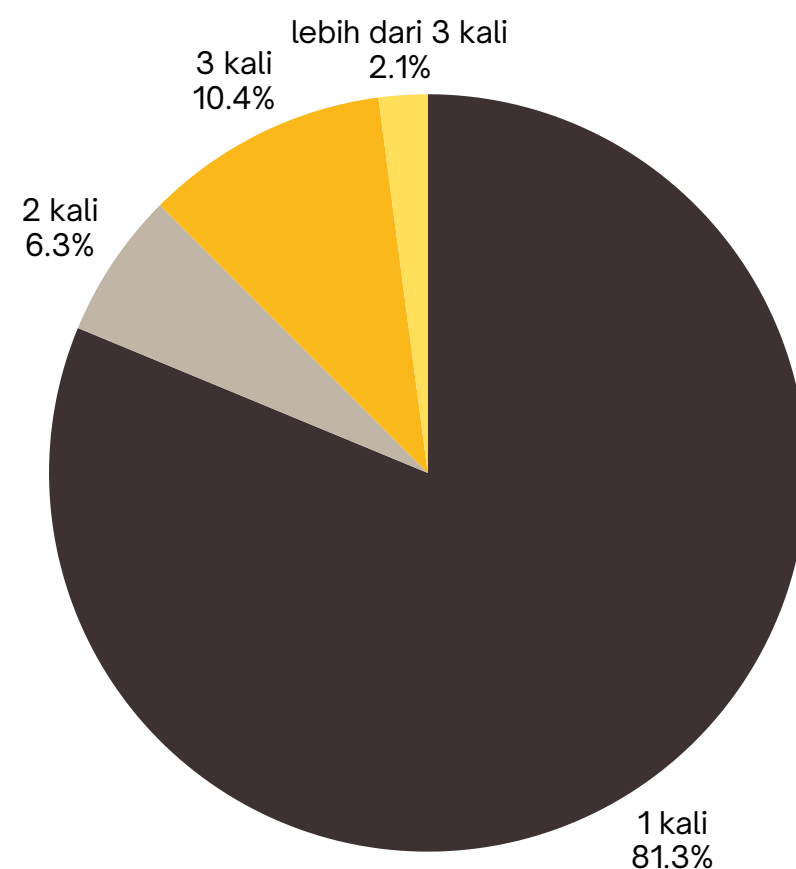




Layanan Informasi PPID Tingkat I DJPb

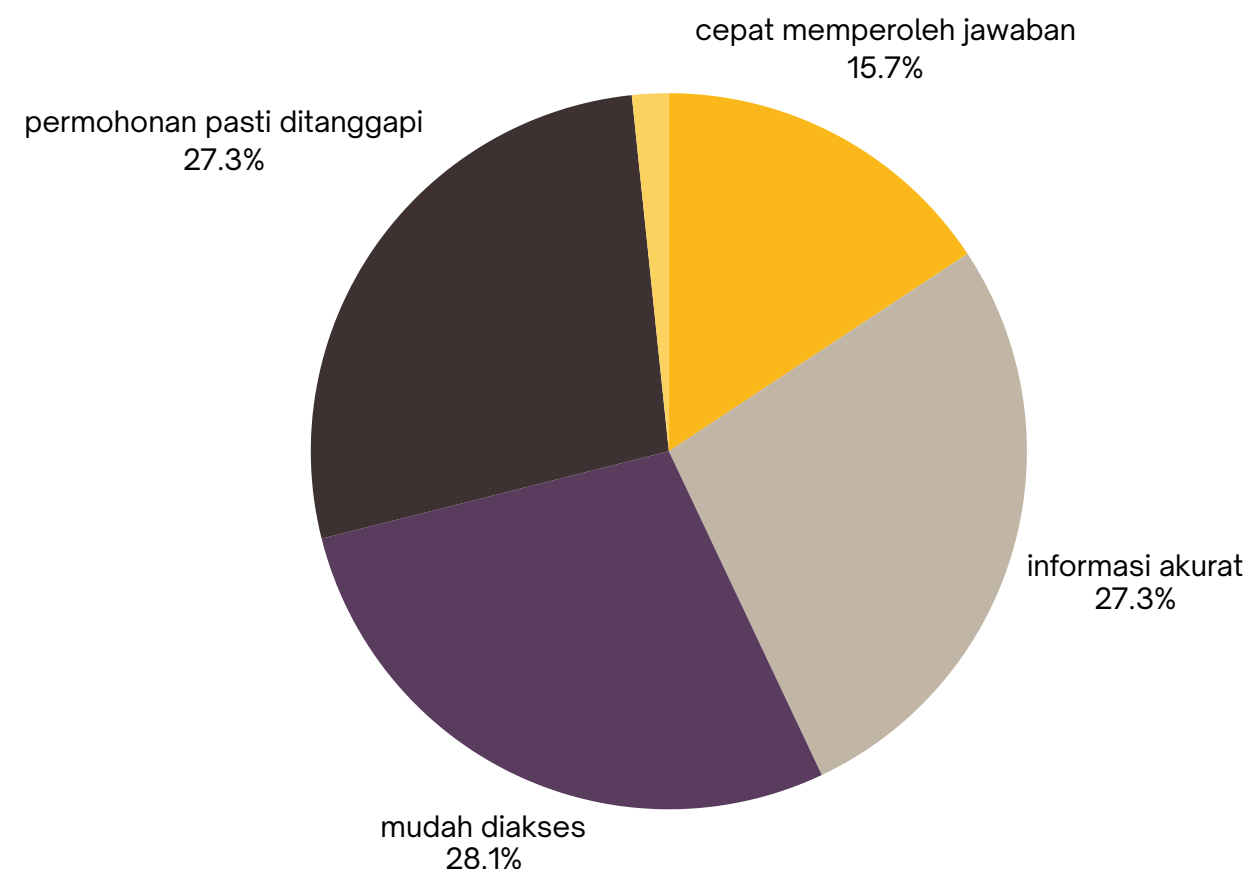
Frekuensi Permintaan Informasi

- Mayoritas 39 pemohon dalam setahun hanya mengajukan satu kali permohonan informasi kepada PPID lingkup DJPb (81,25%) sedangkan sisanya bervariasi dari dua kali dalam setahun sebanyak 3 pemohon (6,25%), dan tiga, atau lebih dari tiga permohonan sebanyak 6 pemohon (12,49%).



Alasan Pemohon Mengajukan Permintaan

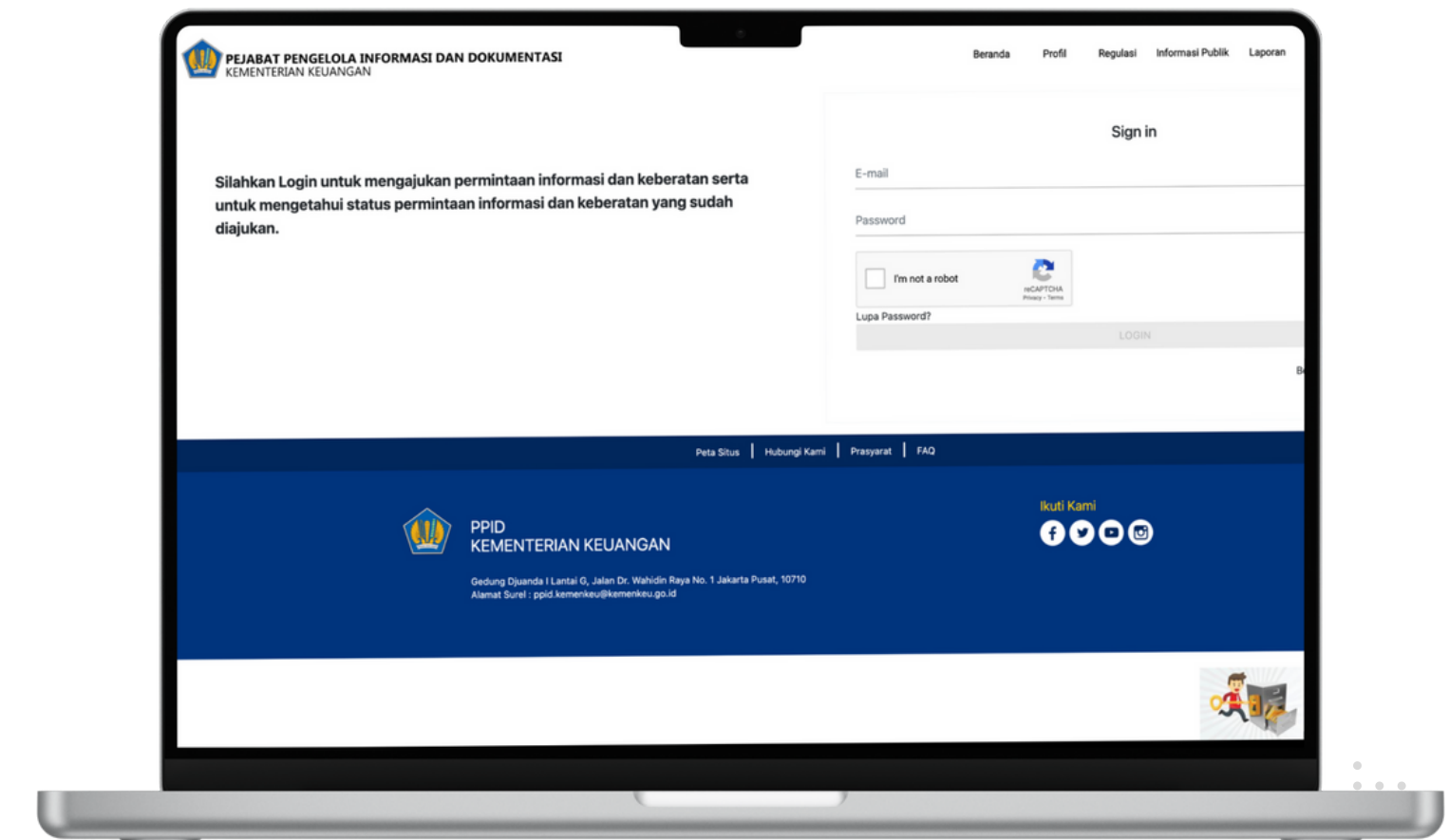
- Alasan pemohon menggunakan layanan informasi pada PPID lingkup DJPb didominasi karena mudah diakses (28,09%), sedangkan alasan kedua karena informasi akurat dan permohonan pasti ditanggapi (27,27%), selanjutnya cepat memperoleh tanggapan (15,70%).





Penggunaan Website e-PPID Kementerian Keuangan

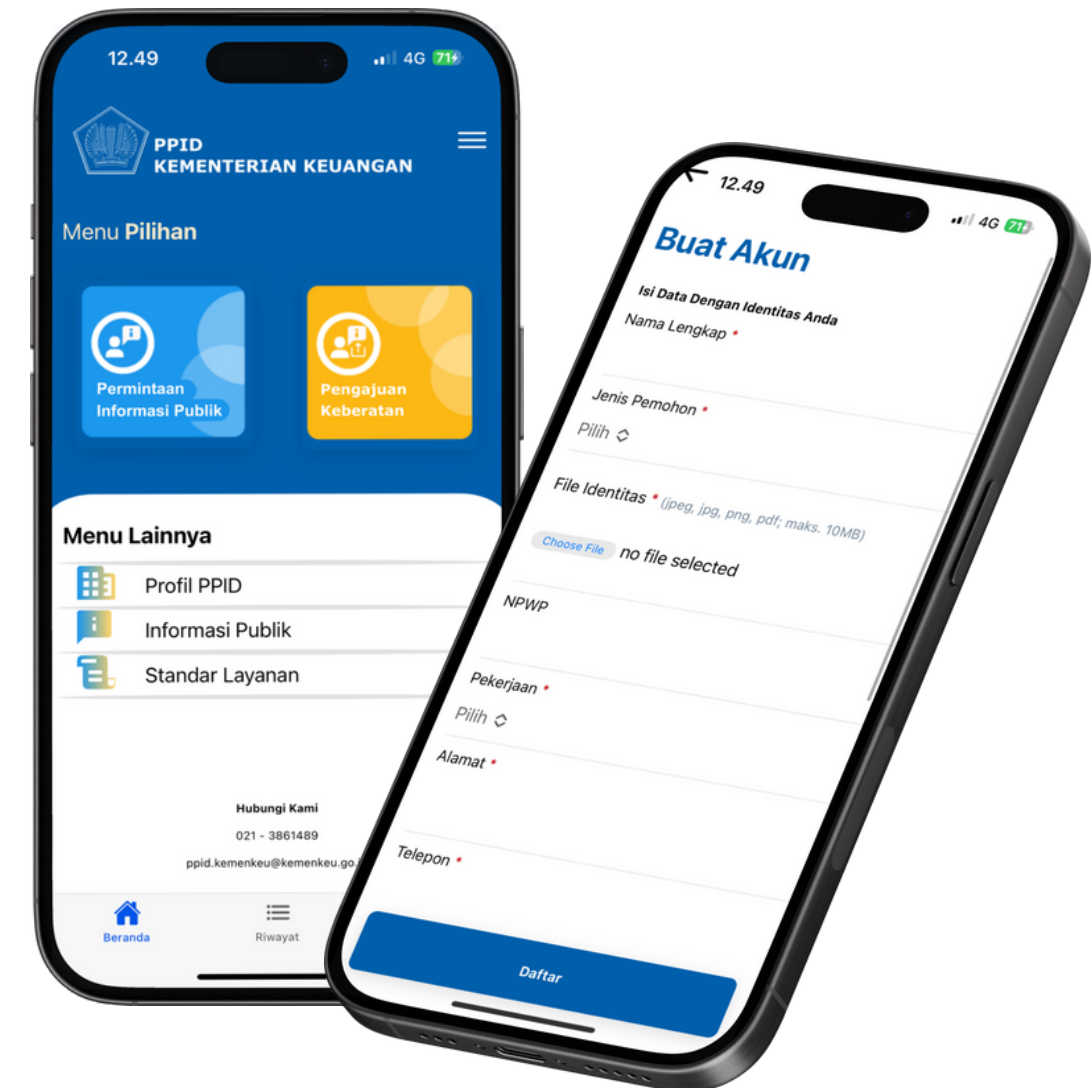
- Dari 56,25% Pemohon informasi yang menggunakan website e-PPID Kementerian Keuangan, seluruhnya merasa sangat terbantu manfaatnya serta bersedia merekomendasikan kepada orang lain (100%).
- Sementara pemohon yang menyukai website e-PPID Kementerian Keuangan karena kemudahan akses dari desain aplikasi sebesar 96,29% dan karena keunggulan fitur-fitur pada website sebesar 96,29%.





Penggunaan Aplikasi Mobile PPID Kementerian Keuangan

- Di sisi lain Pemohon informasi yang menggunakan Aplikasi Mobile PPID hanya terdapat 6,25% dengan tingkat kepuasan dari manfaat aplikasi serta bersedia merekomendasikan kepada orang lain sebesar (100%).
- Sementara seluruh pengguna pemohon yang menggunakan Aplikasi Mobile PPID menyukai aplikasi tersebut karena kemudahan akses dari desain aplikasi serta karena keunggulan fitur-fitur pada website (100%).





Kepuasan Layanan Informasi PPID Tk. I DJPb

- Rata-rata kepuasan Layanan Informasi PPID Tingkat I DJPb dari seluruh responden adalah sebesar 9,05 dari skala 10. Sementara penghitungan per komponen dari responden antara lain:





Pemahaman Responden

Sebanyak
95,83%
pemohon telah
mengetahui
syarat-syarat
yang
dibutuhkan
dalam
mengajukan
permohonan

Sebanyak
89,58%
pemohon
mengetahui
bahwa
tanggapan
informasi
publik memiliki
jangka waktu
10 hari kerja
dan opsi
perpanjangan 7
hari kerja

Sebanyak
97,92%
pemohon telah
mengetahui
bahwa **terdapat**
informasi yang
disajikan di
website PPID

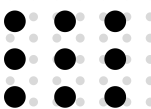
Sebanyak
87,5%
pemohon
mengetahui
terdapat
informasi yang
dikecualikan

Sebanyak
66,67%
pemohon telah
mengetahui
permohonan
dapat diajukan
langsung
kepada PPID
Tk. I DJPb, PPID
Tk. II (lingkup
Kanwil) dan
PPID Tk. III
(lingkup KPPN).



Kesimpulan

- Survey kepuasan layanan PPID Tk. I DJPb tahun 2024 dilaksanakan untuk mengukur kepuasan layanan atas permintaan informasi yang diajukan pada tahun 2023. Sebanyak 48 jumlah responden memberikan respon yang cukup bagus terhadap layanan PPID lingkup DJPb.
- Periode pelaksanaan pengambilan sampel dilakukan pada bulan Januari s.d. Desember 2024 dengan target responden sebanyak 105 responden. Adapun tingkat pengisian sebesar 45,71% (48 responden) dan telah memenuhi syarat minimal responden (30 responden).
- Rata-rata kepuasan kinerja layanan PPID lingkup DJPb dari seluruh responden sebesar 9,05 menunjukkan hasil cukup bagus dengan Indeks Kepercayaan Bahwa Permohonan Pasti Ditanggapi memiliki skor tertinggi 9,21 dibanding dengan indeks yang lain. Indeks yang mendapatkan nilai terendah yaitu indeks kecepatan memperoleh jawaban 8,72.
- Tingkat pemahaman responden menunjukkan sebesar 95,83% telah mengetahui persyaratan layanan pada PPID Tk. I DJPb namun hanya sebanyak 89,58% yang mengetahui bahwa tanggapan informasi publik memiliki jangka waktu 10 hari kerja dan opsi perpanjangan 7 hari kerja. Hanya 66,67% responden yang mengetahui bahwa permohonan dapat diajukan langsung ke perangkat PPID di bawah PPID DJPb.

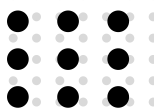




Rekomendasi

Berkenaan dengan hasil survei tersebut, dirumuskan rekomendasi sebagai berikut.

- Peningkatan Sosialisasi dan Publikasi, Sosialisasi layanan PPID perlu lebih ditingkatkan agar lebih banyak orang mengetahui fasilitas yang tersedia serta perlu dilakukan publikasi berkala terkait layanan PPID, termasuk perbedaan wewenang antara unit Eselon I.
- Kemudahan Akses dan Proses Layanan, Tampilan website sebaiknya lebih dipermudah untuk meningkatkan kenyamanan pengguna.
- Konfirmasi dan Validasi Data, Perlu ada fitur untuk mengonfirmasi kembali data yang telah diberikan guna menghindari perbedaan atau kesalahan informasi.
- Koordinasi dan Kecepatan Respon. Pengumpulan data harus lebih cepat lalu perlunya Koordinasi dengan pemohon informasi perlu ditingkatkan untuk memastikan kebutuhan data terpenuhi dengan baik.





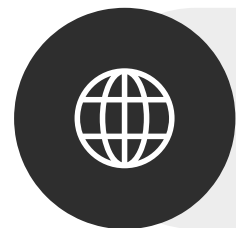
TERIMA KASIH



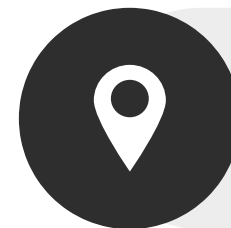
(021) 386 5130



@ditjenperbendaharaan



www.djpb.kemenkeu.go.id



DJPb.KemenkeuRI

